

Strategi Dinas Pasar Kota Semarang Dalam Mewujudkan Daya Saing Pasar Tradisional Terhadap Keberadaan Pasar Modern

Bangkit Kun Prawira - 14010112140147

bangkitkuns@yahoo.co.id

Dosen Pembimbing : Dra. Sulistyowati, M.Si.

suliestyowati@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Adanya strategi kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pasar Kota Semarang untuk turut mewujudkan daya saing yang dibutuhkan pasar tradisional di kota Semarang ditengah menjamurnya pasar modern . Kota Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang sering dijadikan lahan bisnis oleh para investor, baik investor asing maupun investor local dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang sedang diteliti dan menjadi pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan mengenai strategi yang dilakukan Dinas Pasar Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern adalah dengan melakukan strategi intervensi fisik, rehabilitasi ekonomi, dan revitalisasi sosial. Pada strategi intervensi fisik, dinas pasar kota Semarang melakukan perbaikan struktur, infrastruktur, sarana maupun prasarana pendukung dari pasar tradisional untuk menciptakan lingkungan berbelanja yang nyaman bagi konsumen sehingga tetap memilih untuk datang dan berbelanja di pasar tradisional yang fasilitas dan lingkungannya tidak kalah dari pasar modern.

KATA KUNCI

Semarang, Pasar Tradisional, Strategi Revitalisasi

Pendahuluan

Setiap negara memiliki perkembangan ekonomi yang berbeda, dikarenakan adanya perbedaan antara negara berkembang dan negara maju. Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang, itu terlihat dari pemerintah di Indonesia yang sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Pembangunan pada bidang ekonomi memiliki tujuan guna meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang, sehingga masyarakat akan sejahtera dan pertumbuhan ekonomi akan stabil.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini menunjukkan tren positif seiring dengan pertumbuhan era globalisasi yang semakin pesat. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat di era globalisasi memberikan efek perubahan terhadap pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu lahirlah bermacam-macam fasilitas perbelanjaan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya usaha baru yang tumbuh di tengah masyarakat salah satunya adalah toko modern. Toko modern yang berdiri di Indonesia saat ini, bukan saja bersaing dengan sesama toko modern dan supermarket di pusat perkotaan, tetapi juga menjadi saingan dan berpotensi mematikan pedagang kecil dan pasar tradisional karena perkembangannya yang kurang terkendali. Sebagai salah satu fasilitas perbelanjaan, pasar tradisional menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena merupakan wadah interaksi sosial dan representasi dari nilai-nilai tradisional.

Pasar tradisional juga merupakan tempat yang relatif lebih bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas, terutama yang bermodal kecil. Selain itu pasar tradisional merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, lewat retribusi yang ditarik dari para pedagang. Adanya akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan faktor penting dalam perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada skala lokal, regional maupun nasional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual-beli secara langsung dan ditandai dengan adanya proses tawar-menawar. Kebanyakan barang-barang yang dijual merupakan barang untuk kebutuhan sehari-hari. Transaksi jual-beli tersebut dilakukan menggunakan mata uang dengan nilai tertentu sehingga masyarakat yang tidak memiliki barang untuk ditukarkan dapat memperoleh kebutuhannya.

Pasar tradisional dapat dikaitkan sebagai indikator dari negara berkembang karena sesuai dengan ciri-ciri negara berkembang yang diungkapkan oleh Michael P. Todaro yaitu pendapatan perkapita yang rendah. Oleh karena itu tingkat pendapatan perkapita yang rendah menyebabkan banyaknya masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada produksi pertanian dan pasar tradisional.

Karena merupakan negara berkembang, di Indonesia masih banyak sekali terdapat pasar tradisional yang biasanya terletak dekat dengan perumahan dan perkampungan, sehingga pembeli mudah untuk mengunjunginya. Namun, keadaan pasar tradisional di Indonesia cenderung kotor, kumuh dan tidak terawat sehingga masyarakat enggan untuk berbelanja di sana.

Di era globalisasi ini, prinsip efektif dan efisien berlaku di segala bidang kehidupan dengan penyesuaian-penyesuaian yang berdasarkan pada konteks situasi dan kondisi. Pasar modern akan sangat mudah bersaing dengan pasar tradisional dengan kelebihanannya terkait dengan kenyamanan berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang semakin beragam serta kualitas produk yang semakin meningkat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Manajemen Pemerintahan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Manajemen Pemerintahan

- a. Manajemen Pemerintahan

Menurut Ermaya Suradinata, manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara. Sementara itu, Sondang P. Siagian mendefinisikan manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.

Menurut Ramto, manajemen pemerintahan adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia. Sedangkan menurut Kristiadi, manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakat.

b. Fungsi Manajemen Pemerintahan Daerah

Seperti halnya manajemen secara umum, manajemen pemerintahan juga memiliki fungsi. Adapun fungsi manajemen pemerintahan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek, dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi perencanaan ini mencakup juga penetapan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Biasanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses perencanaan yang baik harus melalui langkah-langkah berikut yang merupakan siklus perencanaan : collection and processing of data, diagnosis, formulation of policy, assesment of future needs, costing of nedds, target-setting, plan formulation, plan elaboration, plan implementation, evaluation, and revision and replanning sebagai bahan collection and processing of data.

Karena itu dalam membuat suatu program-program pembangunan, penyelenggara negara harus mengumpulkan dan memproses data terlebih dahulu. Bahkan bila perlu membuat organisasi dan prosedur kerja, melakukan reorganisasi struktural. Pada langkah selanjutnya, perencana harus melakukan diagnosis terhadap tujuan, sasaran, relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Pada waktu merumuskan tujuan, perencana harus memastikan apakah program-program pembangunan sekarang adequote, relevan, dan kondusif untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Termasuk dalam upaya mendiagnosis adalah mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Formulation of policy merupakan tahap selanjutnya dari perencanaan yang merupakan kegiatan memperbaiki dan mengoreksi segala kelemahan dan kekurangan (dari hasil diagnosis) guna meningkatkan relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Tindakan kolektif ini dilakukan dengan menjabarkan kerangka umum menjadi keputusan-keputusan yang detail.

Assesment of needs adalah langkah selanjutnya perencanaan yang memfokuskan jumlah orang yang harus dilayani; jumlah, hakekat, dan ukuran institusi untuk mencapainya; jumlah, kemampuan, dan persyaratan tugas orang-orang yang akan mengorganisir dan melaksanakan program-program pembangunan; sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan untuk mengimplementasikan kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Setelah menilai kebutuhan di masa mendatang terebut, langkah selanjutnya adalah memberikan cost kepada setiap kebutuhan dalam program pembangunan. Langkah selanjutnya adalah menyusun target

utama setelah mendapatkan data dari berbagai sumber, perencana program perlu mengkaji ulang kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang, menentukan prioritas, menyusun target yang realistis yang dapat dicapai.

Setelah target disusun dan prioritas telah ditentukan, perencana melakukan plan formulation, yaitu merumuskan dengan kata-kata apa saja rencana yang isinya menyajikan seperangkat keputusan pemegang otoritas dan memberikan blue-print untuk semua tindakan-tindakan penyelenggara negara.

Kemudian langkah selanjutnya adalah mengelaborasi rencana dengan membuat program atau proyek-proyek pembangunan yang kemudian diimplementasikan. Dalam implementasi ini perencanaan di merger dengan proses manajemen dalam usaha-usaha pembangunan, menggunakan budget tahunan atau rencana tahunan sebagai instrument principal, frame work organisasi dikembangkan sesuai dengan aneka proyek atau program, pengalokasian sumber daya sesuai dengan masing-masing program.

Tahap terakhir dari proses perencanaan adalah evaluation revision, dan replanning. Pada saat rencana diimplementasikan, perlengkapan untuk mengevaluasi sudah harus disusun. Sementara evaluasi secara normal dilaksanakan secara berkelanjutan dan secara simultan berbarengan dengan implementasi rencana, persiapan laporan dapat diperbaiki.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu usaha mengelompokkan pekerjaan yang diatur melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan.

Fungsi ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang. Pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh unit-unit penugasan, pelimpahan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, hubungan informasi vertikal dan horizontal, dalam koordinasi yang efektif dan efisien.

Salah satu kegiatan pengorganisasian adalah penyusunan staf (departemenisasi). Penyusunan staf (departemenisasi) adalah suatu usaha penempatan orang-orang yang tepat ke dalam unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi sesuai dengan persyaratan kerja dan uraian langkah kerja dari suatu program atau kebijakan.

3. Penggerakan

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Karena itu, penggerakan dalam manajemen pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi dalam pemerintahan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggerakan meliputi kegiatan memberi motivasi dan mengarahkan kepada masing-masing sasaran unit kerja.

Ada beberapa faktor dominan dalam menentukan keberhasilan penggerakan, yaitu kepemimpinan, sikap dan moral, komunikasi, insentif supervisi, dan disiplin. Keberhasilan suatu organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya bukan hanya tergantung kepada perencanaan dan pengorganisasian yang baik, melainkan juga tergantung kepada penggerakan, pengawasan (monitoring) dan pengendalian, serta evaluasi.

4. Pengawasan (Monitoring) dan Pengendalian

Monitoring merupakan bagian dari manajemen pembangunan dalam pemerintahan yakni kegiatan mengamati/meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan program yang sedang berjalan dalam kegiatan pemerintahan. Monitoring dalam

rangka pengendalian diberi pengertian juga sebagai suatu proses pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk kemudian diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.

Fungsi pengendalian umumnya terdapat pada pimpinan baik pimpinan tinggi daerah (Bupati/Walikota), menengah (jajaran di bawah Bupati/Walikota) maupun pimpinan terendah (pelaksana kegiatan/program). Sedangkan fungsi pengawasan terutama dilakukan oleh lembaga khusus yang melakukan kegiatan pengawasan, baik internal (Inspektorat Kabupaten/Kota) maupun lembaga eksternal (LSM, masyarakat dan legislatif, dan BPK).

5. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan (program) yang telah direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis dan objektif dengan menggunakan metode yang relevan.

Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi pengambilan keputusan. Evaluasi program juga merupakan upaya untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program. Untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan yang sudah tercapai dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya.

Evaluasi program merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat disajikan sebagai pertimbangan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Evaluasi program juga merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya.

Evaluasi program juga merupakan upaya mengetahui efektivitas komponen dalam mendukung pencapaian tujuan program. Untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan yang sudah tercapai dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya, perlu adanya evaluasi program. Tanpa adanya evaluasi, keberhasilan dan kegagalan program tidak dapat diketahui.

Jadi Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Secara singkat, evaluasi program merupakan upaya untuk mengukur ketercapaian program, yaitu mengukur sejauh mana sebuah kebijakan dapat terimplementasikan.

Supaya pelaksanaan manajemen pemerintahan berjalan sesuai yang diharapkan, maka fungsi manajemen pemerintahan di atas tidak dapat dijalankan sendiri-sendiri, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program harus dijalankan secara berurutan.

Meskipun dalam perumusan fungsi-fungsi manajemen berbeda-beda, akan tetapi pada hakikatnya memiliki esensi yang sama. Masing-masing fungsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang hampir serupa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan misalnya pengumpulan data, penentuan sasaran, penentuan metode, penentuan alat, kriteria keberhasilan termasuk dalam fungsi perencanaan. Kegiatan berupa pembagian tugas, pengelompokan tugas, penentuan susunan organisasi, kedudukan dalam organisasi apakah sebagai pimpinan, staf, merupakan kegiatan-kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Beberapa kegiatan yang dapat di kelompokkan dalam fungsi pelaksanaan seperti pemberian perintah yang perlu dikerjakan, penggerakkan, bimbingan. Sedangkan fungsi pengawasan meliputi penilaian hasil dibandingkan dengan tujuan dan standar yang harus dicapai, penilaian ketaatan, pengecekan, evaluasi.

Strategi Dinas Pasar Kota Semarang Dalam Mewujudkan Daya Saing Pasar Tradisional

Untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern, Dinas Paasar Kota Semarang melakukan langkah dalam merevitalisasi pasar. Langkah revitalisasi pasar tersebut mengacu pada tiga strategi yaitu Intervensi Fisik, Rehabilitasi Ekonomi dan Revitalisasi Sosial.

1. Intervensi Fisik

Intervensi Fisik merupakan strategi yang pertama bagi Dinas Pasar Kota Semarang dalam upayanya meningkatkan daya saing pasar tradisional. Intervensi fisik dilakukan dengan cara memperbaiki struktur maupun infrastruktur dari pasar tradisional sekaligus memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan hasil penelitian mengenai intervensi fisik yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Semarang tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan adanya perbaikan kualitas dan kondisi fisik dari bangunan-bangunan pasar tradisional yang ada di Semarang.

2. Rehabilitasi Ekonomi

Strategi yang kedua adalah rehabilitasi ekonomi. Strategi ini dilakukan dengan mekanisme revitalisasi yang dimulai dari perencanaan yang melibatkan pedagang melalui PPIP/ kelompok dengan melihat bentuk fisik bangunan yang layak atau yang tidak layak untuk dipertahankan dan dipelihara, jika bangunan tersebut tidak layak maka perlu dilakukan revitalisasi.

Implementasi revitalisasi pasar tradisional di Kota Semarang saat ini senilai amanah RPJMD kota Semarang setiap tahunnya ada 2 pasar yang di revitalisasi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sudah ada 16 pasar yang di revitalisasi. Dari revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan ada yang tidak berhasil, kemudian pasar menjadi mati, tidak berkembang dan stagnan contoh di Bulu dan Dargo.

Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya cara mempromosikan pasar tradisional yang telah direvitalisasi yaitu mengadakan event-event promosi di pasar, mengadakan potongan harga/discount, mengadakan hiburan-hiburan di pasar selain itu perlu adanya pemberitaan lewat media (surat kabar dan televisi) dan media sosial (Instagram, facebook).

Urban realm pada revitalisasi pasar tradisional saat ini masih belum bisa dicapai karena pasar tradisional merupakan bagian ekonomi tingkat menengah ke bawah. Sehingga pemkot Semarang perlu mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial di pasar tradisional. Pemkot harus membangun akses menuju pusat perekonomian sebanyak-banyaknya dan semudah-mudahnya, bukan malah mempersulit akses lalu lintas ekonomi dengan mengatur jalan menjadi satu arah. Selain itu dalam setiap pembangunan pasar/revitalisasi pasar, pedagang tidak dibebani biaya hanya kebijakan retribusi yang menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

3. Revitalisasi Sosial

Untuk mendorong terjadinya revitalisasi sosial, pemkot Semarang perlu menghubungkan antar lingkungan pasar agar bisa saling terhubung. Kondisi yang terjadi saat ini adalah antar lingkungan pasar masih belum terhubung oleh prasarana jalan. Oleh karena itu banyak terdapat pasar yang sepi pengunjung karena akses menuju ke pasar tersebut terlalu rumit untuk dilewati atau bahkan masyarakat kurang tahu apabila di daerah tersebut terdapat pasar.

Upaya yang dilakukan dinas pasar kota Semarang untuk mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial diantaranya:

Membuat dan melakukan berbagai kegiatan yang obyek atau lokasinya di lingkungan pasar tradisional. Seperti contohnya festival kuliner perdagangan pasar & pedagang kaki lima kota Semarang, mengadakan expo yang bernama "Antique", dll

Promosi di berbagai media, baik media elektronik, baliho dan media sosial.

Bentuk lingkungan pasar tradisional yang mampu menarik bagi masyarakat adalah lingkungan yang nyaman gampang dituju, ditempuh ada system keamanan dan penerangan jalan umum. Sedangkan untuk infrastrukturnya sendiri Lingkungan pasar perlu Higienis (Sehat dan Bersih), Strategis dan Tertata,serta memiliki Ciri Khas (Daya Tarik) dengan tempat parkir yang luas untuk menampung kendaraan dari konsumen yang datang ke pasar.

Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pasar Kota Semarang

Dampak positif revitalisasi pasar tradisional bagi dinamika masyarakat adalah adanya peningkatan antusiasme dan minat masyarakat untuk lebih senang belanja ke pasar tradisional dengan kondisi fisik pasar yang lebih baik,higienis dan tertata. Kondisi tersebut akan membawa pada kondisi pasar tradisional yang makin nyaman,lingkungan pasar bersih,zonasinya tertata,kondisi antara pedagang dan pembeli terlihat bergairah bertransaksi (Pasar banyak pembeli/ramai). masyarakat merasa pemkot memperhatikan kelayakan untuk peningkatan taraf hidup pedagang,merasa nyaman dengan revitalisasi pasar yang ditata dengan rapi,kemudahan untuk mencari kebutuhan karena sudah ditata sesuai dengan jenis jualan,sarana prasarana yang sudah memadai. Kondisi ini akan memberikan perasaan adanya ketertiban dan kenyamanan dalam bertransaksi di pasar tradisional. Contoh dampak positif revitalisasi pasar tradisional bagi dinamika masyarakat adalah Pasar yang sebelumnya sepi pengunjung dan pedagang menjadi lebih ramai pedagang maupun pengunjung karena fasilitas pasar telah memadai dan memberikan dampak kenyamanan. Sebagai contoh pasar tradisional yang telah lebih tertata adalah pada pasar Pedurungan, Jrakah, Genuk, Peterongan, Wonodri, dan Bulu.

Faktor yang mampu menghambat revitalisasi pasar tradisional adalah penentuan Lokasi Relokasi Sementara Pedagang selama Revitalisasi Pasar berjalan, Untuk pembangunannya harus menyediakan lapak sementara sedangkan lahan untuk lapak sementara tidak mudah (sulit).hal ini terjadi pada saat akan membangun pasar karanganyar yang gagal dibangun karena lokasi lapak sementara ditentang warga sekitar.

Jika Pasar tersebut merupakan Bangunan Konservatif (Cagar Budaya) yang menjadi hambatan adalah pengajuan ijin dan Batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam melakukan revitalisasi fisik bangunan pasar. Proses Administrasi (berkaitan dengan anggaran dan dokumen), Kegiatan Revitalisasi Pasar,baik itu melalui proses Lelang atau Penunjukan Langsung membutuhkan dana, sedangkan seringkali anggaran belanja untuk revitalisasi pasar cukup minim.

Strategi Dinas Pasar Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan mengenai strategi yang dilakukan Dinas Pasar Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern adalah dengan melakukan strategi Intervensi Fisik, Rehabilitasi Ekonomi dan Revitalisasi Sosial. Pada strategi intervensi fisik, Dinas Pasar Kota Semarang melakukan perbaikan struktur, infrastruktur, sarana maupun prasarana pendukung dari pasar tradisional untuk menciptakan lingkungan berbelanja yang nyaman bagi konsumen sehingga tetap memilih untuk datang dan berbelanja di pasar tradisional yang fasilitas dan lingkungannya tidak kalah dari pasar modern.Strategi selanjutnya adalah rehabilitasi ekonomi. Strategi ini dilakukan dengan mekanisme revitalisasi yang dimulai dari perencanaan yang melibatkan pedagang melalui PPIP/kelompok dengan mengadakan event-event promosi yang dilakukan di lingkungan pasar Revitalisasi sosial yaitu dilakukan dengan membangun akses menuju pusat perekonomian yang sebanyak-banyaknya dean semudah-mudahnya. Kemudian setiap pembangunan pasar/revitalisasi pasar, pedagang tidak dibebani biaya, hanya kebijakan retribusi yang menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Saat ini masih ada kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan yang ada di lapangan, kesenjangan ini seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan maupun yang diharapkan baik dari faktor internal maupun eksternal akibat adanya kepentingan/kebutuhan yang tidak diduga,

kebutuhan pedagang dan konsumen tidak sesuai dengan desain fisik yang telah dibangun. Hal ini terjadi pada pasar yang belum direvitalisasi. Oleh karena itu apabila tidak segera direvitalisasi, yang dikhawatirkan adalah pasar tradisional tersebut akan kehilangan konsumennya. Hal ini perlu menjadikan adanya intervensi fisik yang berkaitan dengan bentuk, sarana maupun prasarana pasar tradisional sebagai strategi utama dalam revitalisasi pasar tradisional.

Bentuk intervensi fisik yang ideal berkaitan dengan bentuk pasar tradisional yang ada di kota Semarang adalah dibangun dengan satu lantai saja dengan lahan yang luas, jika diperlukan Pemerintah Kota Semarang perlu membeli lahan di sekitarnya untuk perluasan pasar sehingga pasar tersebut menjadi pasar yang representatif dari segi aksesibilitas dan dari segi sarana prasarana yang memadai serta nyaman, aman murah, memiliki daya tarik.

Kualitas dan kondisi fisik bangunan yang perlu diperbaiki adalah penampilan pasar yang seharusnya dibuat lebih menarik sehingga lebih banyak mengundang konsumen untuk berkunjung dan berbelanja di pasar tradisional. Selain itu perbaikan kualitas dan kondisi fisik pasar wajib dilakukan pada fasilitas atau bangunan pasar yang sudah berkurang fungsinya atau bahkan sudah tidak layak. Hal tersebut sesuai dengan amanat RPJMD kota Semarang yaitu minimal dalam setiap satu tahun ada 2 pasar tradisional yang direvitalisasi atau dibangun. Sehingga ke depannya semua pasar tradisional bisa memenuhi standar pasar sehat dan ber-SNI

Kebutuhan akan ruang terbuka seperti lahan parkir dan taman di lingkungan pasar perlu ditambah seiring dengan bertambahnya luas area pasar yang dibangun dan semakin bertambahnya pedagang maupun pengunjung. Kebanyakan pasar di kota Semarang, luas lahan dan jumlah pedagang tidak mencukupi, sehingga dalam dibangunnya pasar tradisional secara vertikal (bertingkat) kadang menjadi persoalan di lapangan. Diperlukan juga penambahan dan perbaikan akses jalan menuju pasar, sehingga konsumen dan pedagang mendapatkan kemudahan untuk menuju pasar tradisional tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada Masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang yang sudah memberi perhatian yang lebih terhadap perkembangan pasar tradisional di kota Semarang, dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- INDEF. 2008. Data Penelitian INDEF mengenai Dampak Persaingan Pasar Modern dengan Pasar Tradisional. *Jurnal Quarterly Review of Indonesian Economic* Vol. 9 No.2 tahun 2008, published by INDEF, ISSN 1410-2625 ha. 23
- Moloeng, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdyakarya.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009.
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Salam, Dharma Setyawan. 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Alfabeta.
- Sutiyanto. 2008. *Masa Depan Pasar Tradisional*. Dirjen Cipta Karya
- Tayibnapis, Yusuf Farida. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rienaka Cipta
- Zumrotin, KS. 2002. *Pola Keterkaitan Pasar Modern Dengan Pasar Tradisional*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.

Daftar Informan

R. Agus Rohmatullah – Bidang Bina Usaha

Djaru Upoyo ST – Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Moch. Rois – Bidang Penataan dan Penetapan

Diliyanto – Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilitas Harga

Tentang Penulis

Bangkit Kun Prawira adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.